



LAPORAN DELEGASI DPR RI

6TH WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENT

**JENEWA, SWISS
28-31 JULI 2025**

**THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025**



LAPORAN DELEGASI
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

6th World Conference of Speakers of Parliament

Jenewa, Swiss, 28-31 Juli 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konferensi Ketua Parlemen Dunia atau *World Conference of Speakers of Parliament* (WCSP) merupakan forum tingkat tinggi lima tahunan yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU). Forum ini mempertemukan para Ketua Parlemen dari berbagai negara di seluruh dunia untuk membahas tantangan global, memperkuat peran parlemen dalam multilateralisme, dan mendorong kerja sama antar parlemen dalam mengatasi isu-isu strategis lintas negara. Di tahun 2025 ini, IPU menyelenggarakan WCSP ke-6 (6WCSP) di Palais de Nations, markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada tanggal 28-31 Juli 2025. Agenda ini didahului oleh Konferensi Tingkat Tinggi Perempuan Ketua Parlemen (*Summit of Women Speakers of Parliament*) ke-15 (15SWSP) yang diselenggarakan di markas International Labour Organization, Jenewa, pada tanggal 27 Juli 2025, dan khusus dihadiri oleh para perempuan ketua parlemen.

Pada 6WCSP, IPU mengusulkan resolusi parlemen global yang bertujuan memperkuat multilateralisme berbasis keadilan, keterwakilan, dan solidaritas antarnegara. Resolusi ini menekankan pentingnya keterlibatan parlemen

dalam tata kelola global, serta menyoroti peran strategis parlemen dalam memajukan demokrasi, pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta menjawab tantangan transnasional seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Indonesia menyambut baik perumusan resolusi ini sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam membentuk tatanan dunia yang lebih inklusif dan tangguh.

Forum ini menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait peran parlemen dalam memperkuat demokrasi, mendorong tata kelola global yang adil, transformasi digital yang etis, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan keadilan iklim. Dalam forum tersebut, Indonesia juga kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dalam rangkaian agenda 6WCSP, Delegasi DPR RI juga menerima undangan pertemuan bilateral dengan Delegasi Verkhovna Rada Ukraina dan undangan mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi tentang “Menegakkan Hukum Internasional dan Piagam PBB: Sebuah Keharusan Penting bagi Perdamaian dan Keamanan Global” (*High Level Meeting on “Upholding International Law and the UN Charter: A Critical Imperative for Global Peace and Security”*) yang diselenggarakan oleh Delegasi Majles Shoraye Islami Iran. Kedua agenda ini dilaksanakan sebelum Pembukaan 6WCSP pada tanggal 28 Juli 2025 di Palais de Nation.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pelaksanaan Kunjungan kerja BKSAP ke 6th World Conference of Speakers of Parliament di Jenewa, Swiss, 28-31 Juli 2025 ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/KU.05.01/ST/KSOI/7/2025 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 di Jenewa, Swiss.

C. Susunan Delegasi

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 (6WCSP) di Jenewa, Swiss adalah:

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.	F. PKS / A.447	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
--	-----------------------	-------------------------------------

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 (6WCSP) di Jenewa, Swiss antara lain:

1. Berpartisipasi dan berperan dalam Konferensi IPU untuk menguatkan diplomasi parlemen Indonesia dan melaksanakan mandat dari UU MD3 untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyampaikan pandangan DPR RI terkait dengan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis iklim, transformasi digital, dan reformasi tata kelola multilateral.
3. Memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif mendorong multilateralisme yang adil, demokratis, dan representatif.
4. Mendorong kerja sama antarpaulen dalam isu-isu strategis seperti pendanaan iklim, etika kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), perlindungan data, dan SDGs.
5. Menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina serta pentingnya solidaritas internasional dalam menegakkan hukum internasional dan keadilan global.
6. Menjalin jejaring diplomasi parlemen yang lebih erat melalui IPU.

E. Misi Delegasi

Konteks Konferensi 6WCSP yaitu : Tema sentral konferensi: **“A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace, justice and prosperity for all.”** , Tujuannya: memperkuat dimensi parlemen dalam pemerintahan global; mendorong kerja sama antar-parlemen, mendekatkan suara rakyat lewat parlemen ke forum multilateral, serta menerjemahkan komitmen global ke dalam kebijakan nasional. Berdasarkan konteks di atas, maka misi DPR RI dalam pengiriman delegasi ke konferensi tersebut antara lain:

1. Menegaskan komitmen DPR RI terhadap multilateralisme dan kerja sama parlemen global dalam menghadapi tantangan dunia (konflik, ketidakadilan, perubahan iklim, demokrasi).

2. Mengangkat isu-strategis yang menjadi kepentingan Indonesia dan global, seperti perdamaian, keadilan, inklusi sosial, pemberdayaan perempuan, demokrasi, serta memperkuat peran parlemen dalam governance global.
3. Meningkatkan visibilitas dan peran diplomasi parlemen Indonesia, memperkuat jaringan parlemen internasional, dan menjalin kerja sama legislatif bilateral/multilateral.
4. Memastikan bahwa hasil konferensi (deklarasi, rekomendasi) dapat diintegrasikan atau dijembatani ke kebijakan nasional Indonesia serta memperkuat posisi DPR RI dalam forum internasional.

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Delegasi telah melakukan persiapan teknis dan substansi sebelum keberangkatan menuju, Jenewa, Swiss. Persiapan teknis antara lain registrasi, reservasi kamar,hotel, komunikasi dengan KBRI di Jenewa, pengurusan paspor dan *exit-permit* di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan pengurusan surat perjalanan dinas luar negeri. Pada persiapan substansi dilakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait bahan posisi materi, tenaga ahli menyiapkan usulan-usulan dan kertas posisi dalam bentuk statement untuk General Debate tentang pembahasan indikator-indikator spesifik dalam SDGs, siaran pers atau Press Realese, bahan pertemuan dengan banyak pihak terkait di United Nation terutama dengan KBRI di Jenewa.

II. ISI LAPORAN

A. Agenda Persidangan

Tuesday, 29 July 2025	
10:00 - 12:00	Final Meeting of the Preparatory Committee
14.00-14:50	Arrival of Speakers/ Welcome by the IPU and United Nations
15.00-16:00	Inaugural session of the Sixth World Conference of Speakers of Parliament
16.00-18:00	Start of the General Debate on A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace, justice and prosperity for all (Panel Discussion 1)
19.00	Official reception offered by the Parliament of Switzerland
Wednesday, 30 July 2025	
09:30-13.00	Continuation of the General Debate
09.30-11.00	Panel Discussion (Panel 2 : Innovating for a peaceful future, crafting new solutions for a turbulent world)
11.30-13.00	Panel Discussion (Panel 3 : Achieving the SDGs by 2030 : What new opportunities for international cooperation)
13.00-14.30	Lunch
14.30-15.00	Group photo (Speakers Only)
15.00-18.30	Continuation of the General Debate
15.00-16.30	Panel Discussion (Panel 4 : What role for parliaments in shaping our digital future)
17.00-18.30	Panel Discussion (Panel 5 : Protecting and Promoting the rights of persons in vulnerable situations: Towards comprehensive anti-discrimination action)
Thursday, 31 July 2025	
09.30-11.00	Continuation and conclusion of the General Debate
11.00-13.00	Interactive Debate with major stakeholders
14.30-17.00	Closing Session

Konferensi ini membahas peran strategis parlemen dalam memperkuat multilateralisme di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Konferensi ini juga memberikan ruang bagi para ketua parlemen dari seluruh dunia untuk bertukar pandangan terkait tata kelola global yang lebih adil, demokratis, dan inklusif. Isu-isu lintas sektor yang dibahas mencakup pembangunan berkelanjutan (SDGs), perubahan iklim, transformasi digital, ketimpangan global, dan solidaritas antarnegara. Selain itu, konferensi ini mendorong kolaborasi antarparlemen dalam mengatasi tantangan

transnasional melalui dialog terbuka, pertukaran praktik baik, dan penyusunan resolusi bersama.

Konferensi ini dihadiri oleh 30 anggota parlemen dari 9 negara. Hadir pula perwakilan dari anggota asosiasi, pengamat tetap, dan tamu undangan khusus (daftar terlampir).

Rangkaian acara dari Konferensi ini terdiri dari 3 hari pertemuan dengan 5 sesi panel dan 1 sesi diskusi interaktif. Adapun susunan program Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 (6WCSP) adalah:

1. Inaugural Session
2. General Debate on A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace, justice, and prosperity for all.
3. Panel discussion 1: Women's and youth participation in parliament in a time of polarization and adversity
4. Panel discussion 2: Innovating for a peaceful future, crafting new solutions for a turbulent world
5. Panel discussion 3: Achieving the SDGs by 2030: What new opportunities for international cooperation?
6. Panel discussion 4: What role for parliaments in shaping our digital future?
7. Panel discussion 5: Protecting and promoting the rights of persons in vulnerable situations: Towards comprehensive anti-discrimination action
8. Interactive Debate with major stakeholders
9. Closing session
 - Reports from the panel discussions
 - Adoption of the High-level Declaration

B. Partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI

Courtesy Call dengan Delegasi Ukraina

Dalam pertemuan ini, delegasi Ukraina dipimpin oleh Hon. Ms. Olena Kondratiuk, Wakil Ketua Verkhovna Rada, Ukraina. Agenda ini turut didampingi oleh para perwakilan tetap Indonesia dan Ukraina di Jenewa.

Dalam pertemuan ini, delegasi Ukraina menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan Ukraina, seperti melalui dukungan terhadap berbagai resolusi di Majelis Umum PBB, terutama resolusi yang menyerukan perdamaian yang menyeluruh, adil, dan langgeng di Ukraina.

Kedua belah pihak menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antarpemerintah. Ukraina mendorong dilakukannya saling kunjung oleh pemerintah kedua negara, dan mengundang kehadiran Indonesia dalam 4th Summit of Crimea Platform yang akan diselenggarakan pada 24 November 2025.

Ketua BKSAP DPR RI juga menekankan eratnya hubungan bilateral, termasuk melalui kerja sama aktif dengan Duta Besar Ukraina di Jakarta. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pidato Ketua Parlemen Ukraina di Parlemen Uni Eropa beberapa bulan yang lalu.

Lebih lanjut, Ukraina mengusulkan penguatan kerja sama melalui inisiatif “Grain from Ukraine”, yang menunjukkan bahwa meski tengah diserang oleh Rusia, Ukraina tetap berkomitmen menjadi pemasok gandum global, dan telah mengirimkan 250 ribu ton gandum ke 12 negara yang mengalami krisis pangan. Ukraina juga menyampaikan minatnya untuk meningkatkan keterlibatan di kawasan Asia Tenggara, dengan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, dengan maksud menyampaikan pemahaman ke negara-negara lain tentang kondisi di Ukraina.

Salah satu isu utama yang disampaikan adalah isu kemanusiaan. Ukraina mengalami praktik deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina dari wilayah Rusia secara ilegal. Hingga kini, diperkirakan 20 ribu anak telah menjadi korban penculikan Rusia dari wilayah Ukraina yang sementara ini diduduki oleh Rusia. Anak-anak ini dipisahkan dari keluarga dan tidak diperkenankan bersekolah dengan berbahasa Ukraina serta menjalankan ibadah. Mereka mengalami proses indoktrinasi dan militerisasi. Sebagai konteks, ada 1,6 juta anak yang tinggal di wilayah tersebut. Hingga saat ini, Ukraina baru berhasil merepatriasi 1.546 anak. Ukraina mengajak Indonesia untuk bergabung dengan 41 negara lain dalam upaya repatriasi ini.

Sebagai penutup, Ukraina menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kerja sama di tingkat pemerintah dalam merespon berbagai tantangan global. Menanggapi hal tersebut, Ketua BKSAP DPR RI menyatakan dukungannya atas penyelesaian secara damai melalui jalur diplomasi dan menegaskan konsistensi Indonesia dalam mendukung berbagai resolusi di PBB yang menyerukan solusi komprehensif bagi konflik Rusia-Ukraina.

Ketua BKSAP juga mendorong peningkatan kerja sama bilateral melalui mekanisme GKS dan menyambut baik keterlibatan Ukraina dalam kerja sama di kawasan ASEAN, seperti melalui *observer* di AIPA. Indonesia juga menghargai inisiatif koalisi Krimea yang disampaikan Ukraina dan mempersilahkan Ukraina untuk mengirimkan undangan.

High-Level Meeting on Upholding the UN Charter and International Law to Ensure International Peace and Security

Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, yang menyampaikan keprihatian mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyebut kekejaman yang dilakukan oleh Israel sebagai bentuk genosida yang disengaja dan menyamakan tindakan tersebut dengan “Nazi abad ke-21”. Ia mengingatkan bahwa dunia internasional, khususnya parlemen, memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak sebelum dicatat dalam sejarah sebagai pihak yang gagal mencegah kekejaman. Meski Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, tindakan tersebut justru diabaikan oleh komunitas internasional. Iran juga menyoroti serangan militer yang dilakukan Israel pada 7 Juni 2025 terhadap wilayah Iran saat proses negosiasi berlangsung, yang mengakibatkan jatuhnya 1.100 korban sipil, termasuk 14 ilmuwan, 12 anak dan perempuan, serta korban jiwa mencapai 70 orang. Hal ini merupakan pelanggaran atas Piagam PBB Pasal 2.

Malaysia menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar ruang untuk mengulang norma-norma hukum internasional, melainkan untuk menanggapi kenyataan bahwa sistem hukum tersebut tengah mengalami pelemahan serius. Tindakan seperti serangan preemtif yang diklaim sebagai pembelaan diri dan penerapan sanksi ekonomi tanpa mandate PBB menjadi tanda bahwa sistem internasional sedang dirongrong secara perlahan. Tajikistan dan Finlandia menyatakan dukungan terhadap kecaman terhadap Israel, meskipun Finlandia mempertanyakan konsistensi sikap dengan merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina. Pakistan menambahkan dimensi baru dengan menyinggung isu pendudukan ilegal India atas Kasmir, dan menyerukan agar supremasi hukum ditegakkan, bukan kekuasaan.

Indonesia, melalui intervensinya, menegaskan pentingnya Dasasila Bandung (Bandung Principles) yang menekankan perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan, serta menyatakan bahwa Piagam PBB bukanlah idealisme kosong, melainkan instrumen nyata dalam menjaga ketertiban internasional. Sementara itu, Kuba mengecam dukungan Amerika Serikat terhadap kekejaman Israel, menyebutnya sebagai ancaman bagi keamanan kawasan dan dunia. Kuba juga menyerukan agar Amerika Serikat Kembali ke komitmen awalnya terkait nuklir Iran dalam perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Delegasi dari Oman dan Togo juga menekankan pentingnya kembalinya komitmen seluruh negara terhadap Piagam PBB, serta menyerukan penguatan peran parlemen sebagai wakil suara rakyat menolak Tindakan unilateral dan mendukung kerja sama multilateral. Chad secara tegas mengecam serangan Israel terhadap Iran, serta mendorong penyelesaian damai yang adil berdasarkan hukum internasional. Sementara itu, Rusia menekankan bahwa sistem hukum internasional yang sekarang ada adalah hasil dari kemenangan Rusia dan sekutunya pasca Perang Dunia II, dan mengkritik standar ganda yang digunakan oleh negara-negara Barat dalam penegakan hukum. Rusia membedakan tindakannya terhadap Ukraina dari situasi Gaza dengan menyatakan bahwa penggunaan kekuatan oleh Rusia merupakan respon terhadap ketidakadilan struktural.

Delegasi Uni Emirat Arab menutup dengan penekanan bahwa solusi terhadap konflik haruslah melalui diplomasi dan pendekatan politik, bukan kekuatan militer. Dalam kesimpulan, pertemuan ini menyoroti tantangan nyata terhadap multilateralisme, Piagam PBB, dan supremasi hukum internasional, serta memberikan apresiasi atas solidaritas negara-negara terhadap Iran dan Palestina dalam menghadapi tekanan dan agresi militer.

Sixth World Conference Of Speakers Of Parliament

Konferensi ini dibuka dengan beberapa sambutan antara lain:

1. Direktur-Jenderal Markas Besar PBB di Jenewa, Ms. Tatiana Valovaya;
2. Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Dr. Tulia Ackson;
3. *Chef de Cabinet* Sekretaris Jenderal PBB, Mr. Courtenay Rattray;
4. Presiden Dewan Nasional Swiss dan Presiden Pertemuan Tingkat Tinggi Ketua Parlemen Perempuan ke-15, Ms. Maya Riniker;
5. Sekretaris Jenderal Inter-Parliamentary Union (IPU), Mr. Martin Chungong;
6. Pembawa Pesan Perdamaian PBB, Mr. Michael Douglas.



Gambar 1.0 Fokus Pertemuan dalam Agenda 6th World Conference of Speakers of Parliament , di Jenewa, Swiss

General Debate on A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace, justice, and prosperity for all

Agenda dilanjutkan dengan penyampaian pendapat sesuai dengan tema Debat Umum dalam konferensi ini, yaitu “Dunia dalam pergolakan: Kerjasama parlemen dan multilateralisme untuk perdamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi semua”. Sesi ini berlangsung selama tiga hari, paralel dengan sesi panel, dan diisi dengan penyampaian pendapat dari 113 delegasi. Indonesia berkesempatan menyampaikan pandangan di hari ketiga.

Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan pandangan Indonesia dalam sesi ini. Ia menegaskan bahwa parlemen harus pelaku utama dalam menstabilkan demokrasi dan menggerakkan keadilan di tengah dunia yang semakin multipolar. Indonesia mendukung reformasi tata kelola global agar lebih demokratis, setara, dan representatif. Forum parlemen sangat penting untuk berbagi praktik baik dalam tata kelola inklusif, ketahanan bencana, dan implementasi SDGs, terutama di antara negara berkembang.

Terkait krisis iklim, Indonesia mendorong akses pendanaan iklim yang adil dan berkelanjutan serta penguatan pengawasan parlemen terhadap kebijakan iklim dan keamanan. Di era digital, Indonesia juga menyerukan kolaborasi antar-parlemen terkait etika AI, perlindungan data, dan keamanan siber lintas batas. Ia menekankan bahwa transformasi digital harus adil dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Sebagai penutup, Indonesia menegaskan kembali dukungan teguh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Indonesia menyerukan diakhirinya kekejaman di Gaza dan menegaskan pentingnya solidaritas global yang berlandaskan hukum internasional dan keadilan.

Panel 1: Women's and youth participation in parliament in a time of polarization and multilateralism for peace, justice, and prosperity for all

Bersamaan dengan agenda Debat Umum, di hari penghujung hari pertama, panel pertama dilaksanakan. Panel 1 dipandu oleh Ms. Rana Sidani, juru bicara WHO, ICRC, dan IFRC. Pembicara pada sesi ini antara lain adalah Ms. Cynthia Lopez Castro, Presiden Biro Anggota Parlemen Perempuan, anggota Komite Persiapan, Mr. Felipe Paullier, Asisten Sekjen PBB Urusan Kepemudaan, Ms. Gabriella Morawska-Stanecka, Wakil Presiden IPU sekaligus Senator dari Polandia, Ms. Sofia Calltorp, Direktur UN Women Geneva Office dan Kepala Aksi Humaniter UN Women, dan Wessel van der Berg, Petugas Advokasi Senior dari Equimondo Center for Masculinities and Social Justice.

Sesi ini membahas tantangan dan strategi untuk memperkuat partisipasi perempuan dan pemuda dalam parlemen, terutama di tengah meningkatnya polarisasi politik dan ketegangan sosial. Para panelis menekankan pentingnya mendorong parlemen yang responsif terhadap gender (gender-sensitive parliament), sejalan dengan Rencana Aksi IPU. Salah satu isu yang diangkat adalah tren regresif di kalangan generasi muda, seperti meningkatnya sikap misoginis dan keinginan kembali ke peran gender tradisional, yang dinilai mengancam kemajuan kesetaraan gender. Untuk itu, keterlibatan laki-laki dalam perjuangan kesetaraan gender dinilai sangat penting. Panel ini juga menyoroti peran penting multilateralisme sebagai kerangka kerja kolaboratif untuk memastikan bahwa upaya inklusivitas di parlemen dapat dilaksanakan secara lintas negara dengan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Panel 2: Innovating for a peaceful future, crafting new solutions for a turbulent world

Panel 2 dilaksanakan di awal hari kedua. Agenda ini kembali dipandu oleh Ms. Rana Sidani sebagai moderator. Hadir sebagai panelis adalah Ms. Kandia Kamissoko Camara, Presiden Senat Pantai Gading, Mr. Ali Al Nuaimi, Presiden Gugus Tugas IPU untuk Resolusi Damai untuk Perang di Ukraina, Ms. Sanam Naraghi-Anderlini, Pendiri dan Direktur Eksekutif International Civil Society Action Network (ICAN), dan Mr. Zachary Paikin, Wakil Direktur Better Order Project, Quincy Institute.

Panel ini menyoroti eskalasi kekerasan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tren konflik semakin urban, menggunakan bom dan serangan jarak jauh. Meskipun belanja militer dunia mencapai rekor tertinggi sejumlah USD2,72 triliun, konflik terus meluas, memperlihatkan kegagalan pendekatan kekuatan semata. Panel menekankan pentingnya institusi parlemen sebagai jembatan bagi dialog, rekonsiliasi, serta pengesahan kebijakan yang berakar pada pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Disorot pula bahwa keamanan harus dimulai dari manusia. IPU mempromosikan pendekatan human security dan common security sebagai kerangka kerja parlemen, sekaligus menyerukan reformasi kelembagaan multilateral agar lebih inklusif, khususnya terhadap kelompok perempuan dan pemuda yang kerap tertinggal dalam dinamika elit politik. Juga digarisbawahi adalah urgensi pengawasan parlemen terhadap anggaran pertahanan, serta penguatan kerangka hukum terhadap sistem persenjataan otonom dan kecerdasan buatan (AI), mengingat dampaknya terhadap etika dan tata kelola global. Inovasi harus ditopang prinsip tanggung jawab etik dan inklusi, bukan dijadikan alat penindasan baru.

Sebagai simpulan, perdamaian memerlukan keberanian politik, partisipasi yang luas, dan langkah nyata. Parlemen diminta menerjemahkan komitmen hukum internasional ke dalam hukum nasional, menolak kekerasan sebagai opsi, dan memperjuangkan tatanan dunia yang adil serta multilateral. Parlemen bukan hanya pembuat undang-undang, tetapi juga penjaga demokrasi dan pembangun perdamaian. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi dan kompleks, setiap keputusan parlemen akan menentukan masa depan keamanan generasi mendatang.

Panel 3: Achieving the SDGs by 2030: What new opportunities for international cooperation?

Panel ketiga dipandu oleh Ms. Claire Doole, juru bicara dan mantan koresponden BBC. Pembicara di sesi ini adalah Ms. Thorunn Sveinbjarnardottir, Ketua Athingi Islandia, Mr. Alban Bagbin, Ketua Parlemen Ghana, Ms. Susan Brown, Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Biro Hubungan Eksternal dan Advokasi UNDP, dan Ms. Georgina Magesa, aktivis iklim berusia 10 tahun dari Tanzania.

Diskusi panel ini menyoroti bahwa meskipun terdapat pencapaian penting seperti penurunan kasus HIV, peningkatan akses terhadap pendidikan dan listrik, serta perbaikan layanan publik di berbagai negara, baru sekitar 40% target SDGs tercapai. Ini mencerminkan bahwa meski ada kemauan politik dan perubahan pola pikir, tantangan struktural dan pendanaan masih besar.

Dalam konteks ini, parlemen memainkan peran sentral untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan target global, terutama melalui legislasi, alokasi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa SDGs bukan hanya agenda teknokratik, tetapi alat untuk membangun parlemen yang kuat, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Indonesia menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi bermakna, dan pengawasan anggaran sebagai fondasi kepercayaan publik. Model kolaborasi *people-public-private partnership* (4P) juga diangkat sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak didikte oleh elit atau sektor swasta semata, tetapi merupakan hasil dialog lintas sektor dan inklusif.

Dalam forum ini juga dibahas bahwa krisis iklim dan demokrasi kini saling berkelindan, antara lain akibat manipulasi digital dan kurangnya etika dalam teknologi. Penting agar pendanaan global tidak terjebak dalam dominasi sektor pertahanan, melainkan diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan. Inovasi keuangan harus mendukung ekonomi hijau dan inklusif. Kesimpulan utama yang mengemuka adalah SDGs menuntut keberanian dan transformasi nyata, bukan perubahan bertahap. Saatnya parlemen di seluruh dunia bertindak dengan *sense of urgency* untuk masa depan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Panel 4: What role for parliaments in shaping our digital future?

Sesi ini dimoderatori oleh Ms. Caitlin Kraft-Buchman, CEO/Pendiri Women At The Table. Hadir sebagai pembicara adalah Mr. Hugo Motta Wanderley da Nobrega, Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Brazil, Mr. Amandeep Singh Dill, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khusus untuk Teknologi Digital dan Baru, Ms. Sulyna Abdullah, Kepala Perencanaan Strategis dan Keanggotaan International Telecommunication Union (ITU), dan Mr. Jovan Kurbalija, Direktur Eksekutif Diplo.

Sesi ini membicarakan bahwa parlemen memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (AI), dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan demokrasi. Panel menyoroti pentingnya membangun kerangka hukum yang tidak melihat inovasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai dua kutub yang bertentangan. Justru, regulasi yang tanggap, adaptif, dan antisipatif menjadi landasan penting agar inovasi dapat berkembang secara etis dan bertanggungjawab. Kolaborasi internasional di bidang tata kelola AI juga dinilai sangat krusial, mengingat sifat lintas batas teknologi digital yang tidak bisa ditangani secara unilateral.

Diskusi juga menekankan perlunya *capacity building* bagi anggota parlemen agar memahami teknologi digital secara memadai, sehingga dapat menyusun legislasi yang relevan dan progresif. IPU telah menginisiasi berbagai platform, termasuk penyelenggaraan konferensi bertema AI, yang akan memperluas partisipasi parlemen dalam tata kelola digital global. Selain itu, diperlukan strategi nasional yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam perumusan kebijakan digital.

Lebih lanjut, panel menekankan pentingnya penguatan institusi demokrasi dalam menghadapi tantangan disrupsi digital seperti manipulasi informasi dan kesenjangan digital global. Parlemen diminta untuk tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif melalui pendekatan jangka panjang, penguatan anggaran, dan adopsi teknologi yang inklusif.

Panel 5: Protecting and promoting the rights of persons in vulnerable situations: Towards comprehensive anti-discrimination action

Panel kelima kembali dimoderatori oleh Ms. Claire Doole, juru bicara dan mantan koresponden BBC. Panelis yang mengisi sesi panel terakhir ini adalah Ms. Nada Al-Nashif, Deputi Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Mr. Angelo Farrugia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Malta, anggota Komite Persiapan, dan Presiden Komite untuk Mempromosikan Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, Ms. Angela Thokozile Didiza, Ketua Majelis Nasional Afrika Selatan, dan Ms. Yvonne Apiyo Brandle-Amolo, Presiden Penghargaan Keberagaman Swiss dan Kaukus Anggota Parlemen Minoritas Global.

Panel ini dirancang untuk menyoroti bahwa sistem hukum dan tata kelola publik harus dipusatkan pada martabat manusia, bukan sekadar pada struktur negara. Para pembicara menegaskan bahwa kelompok rentan sering mengalami eksklusi sistemik. Oleh karenanya, parlemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan publik, pengakuan hukum, dan perlindungan sosial.



Gambar 1.1 Delegasi BKSAP DPR RI dalam Pertemuan 6th World Conference of Speakers of Parliament , di Jenewa, Swiss

Penutupan

Dalam penutupan, setiap panel menyampaikan laporannya, diakhiri dengan adopsi Deklarasi Tingkat Tinggi Konferensi Dunia Ketua Parlemen Keenam yang berjudul *“A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace, justice and prosperity for all.”*

Setelah Deklarasi diadopsi, Yaman sempat menyampaikan permintaan untuk memasukkan seruan menghentikan genosida di Gaza ke dalam Deklarasi. Presiden IPU kemudian menjawab bahwa naskah sudah diadopsi, dan dalam penyusunannya sudah meminta masukan serta berdiskusi dengan berbagai negara anggota terkait isi naskah tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keikutsertaan DPR RI dalam 6th World Conference of Speakers of Parliament di Jenewa menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap penguatan multilateralisme dan diplomasi parlemen sebagai instrumen utama dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perubahan iklim, transformasi digital, hingga ketimpangan pembangunan.
2. DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam Debat Umum dan panel tematik dengan menyampaikan pandangan dan pengalaman Indonesia dalam mendorong parlemen yang inklusif, adaptif, dan pro-rakyat.
3. Seluruh sesi konferensi menegaskan bahwa parlemen memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi, motor reformasi institusi global, serta penghubung antara komitmen internasional dan aksi nyata di tingkat nasional. Konferensi ini juga menegaskan pentingnya kerja sama antarparlemen untuk menjawab krisis yang saling terkait: krisis lingkungan, krisis kepercayaan, dan krisis etika digital.

B. Saran

1. Memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan dalam isu global.

DPR RI perlu terus memutakhirkan regulasi nasional yang responsive terhadap perkembangan global, seperti kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, dan transisi energi. Di sisi pengawasan, parlemen harus aktif mengawal penggunaan anggaran pembangunan agar lebih berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.
2. Mendorong reformasi tata kelola multilateral.

DPR RI dapat memainkan peran strategis dalam mendorong reformasi institusi multilateral yang lebih inklusif dan representative, termasuk dengan menyerukan demokratisasi dalam pengambilan keputusan global dan pelibatan Global South sebagai *co-architect*, bukan sekadar penerima dampak.
3. Investasi pada kapasitas parlemen dan kolaborasi multipihak.

Peningkatan kapasitas anggota parlemen dalam memahami teknologi dan ekonomi global sangat penting, terutama untuk menghadapi isu-isu baru seperti *digital governance* dan *green economy*. Kolaborasi multipihak, seperti 4P, harus terus didorong dalam perumusan kebijakan.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 (6WCSP) di Jenewa, Swiss ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 569.335.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

B. Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi pada 6th World Conference of Speakers of Parliament di Jenewa dapat tercapai dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Wakil Duta Besar RI di Jenewa, Swiss, beserta jajaran atas bantuan dan dukungan serta fasilitas yang diberikan kepada Delegasi DPR RI dan Sekretariat sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Jendral DPR RI, Biro Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, dan Tenaga Ahli atas dukungan teknis dan Substansi Sejak Sebelum Dan Selama Pertemuan Berlangsung.

C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

1. [Foto dan Video Kegiatan](#)
2. *Invitation 6WCSP*
3. *Programme-6WCSP*
4. *Draft Declaration 6WCSP*
5. *Information Note 6WCSP*
6. Link Berita di Media Sosial :
 - a. [Piagam PBB fondasi tatanan dunia yang adil dan damai](#)
 - b. [Dunia yang Adil Dimulai dari Hukum Internasional yang ditegakkan](#)
 - c. [SDGs perwujudan parlemen kuat dan berpihak pada rakyat](#)

D. Kata Penutup

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pustaka sejarah partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam forum-forum antar parlemen. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam forum-forum antar parlemen lainnya di masa mendatang.

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 5 Agustus 2025

Ketua Delegasi

Dr. Mardani Ali Sera



LAMPIRAN

Sixth World Conference of Speakers of Parliament

United Nations Office at Geneva, Switzerland, 29–31 July 2025

Geneva, 17 December 2024

Dear Madam Speaker,
Dear Mr. Speaker,

We have the pleasure of inviting you to the Sixth World Conference of Speakers of Parliament. This event is being organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU), in close collaboration with the United Nations, and will take place **from 29 to 31 July 2025 at the Palais des Nations (United Nations Office at Geneva)**. The Speakers' Conference will be preceded by the 15th Summit of Women Speakers of Parliament, to be held on 28 July 2025 (separate information to follow shortly).

The Conference, first established in 2000 on the eve of the United Nations Millennium Summit, aims to provide a unique forum for high-level engagement and dialogue among parliamentary leaders from around the world. Previous Conferences, held every five years since then, have served as catalysts for shaping and strengthening the parliamentary dimension of global governance, thereby helping to bridge the democracy gap in international affairs. This occasion will mark the culmination of two years of work by a Preparatory Committee of approximately 20 Speakers of Parliament from all regions of the world, and promises to be the largest ever gathering of its kind. In keeping with the IPU's inclusive approach, it will also feature prominent leaders from other international organizations, academia and civil society organizations, as well as the media.

The Sixth World Conference of Speakers of Parliament is coming at a critical moment for the multilateral system, including the United Nations, in which effective international cooperation is ever more vital but also ever more elusive amid rising global conflict and mistrust. We expect the Conference to make an important contribution to advancing strong and effective multilateralism, as parliaments and their members are called upon to promote democracy and accountability in international affairs, carry out parliamentary diplomacy for peace, bring the people's voice to the United Nations, and translate global commitments into national realities. Further information about the World Conference of Speakers of Parliament, its background and outcomes, is available in the dedicated section of the IPU website [here](#).

It goes without saying that your personal contribution to the Conference is very important to us. We very much hope that you will be able to accept our invitation and join your fellow Speakers from around the world at this unique event.

Yours sincerely,



Tulia Ackson
IPU President



Martin Chungong
IPU Secretary General

Information note

The Sixth World Conference of Speakers of Parliament will take place from 29 to 31 July 2025 at the historic *Palais des Nations* – United Nations Office at Geneva. The Conference will be preceded by the 15th Summit of Women Speakers of Parliament, to be held at the International Labour Organization headquarters in Geneva on 28 July 2025.

The Conference will focus on the overall theme of *A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace and justice for all*. This series of Conferences, first established in 2000 on the eve of the United Nations Millennium Summit, aims to provide a unique forum for high-level engagement and dialogue among parliamentary leaders from around the world.

The Conference is organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU) in close cooperation with the United Nations. All arrangements relating to the event are being made under the guidance of a Preparatory Committee composed of Speakers of Parliament and members of the IPU Executive Committee.

This note is intended to provide a preliminary overview of the general organizational aspects of the Conference.

Schedule of meetings

A **General Debate** on the overall theme of the Conference will be held on Tuesday 29, Wednesday 30, and Thursday 31 July 2025. The Debate will conclude with the adoption of a High-Level Declaration. A preliminary draft of this Declaration has been shared with Member Parliaments for their input by the deadline of 16 May 2025.

Five **panel discussions** will be held in parallel to the Debate on 29 and 30 July 2025 and will address subjects that are linked to the overall theme of the Conference (see the [Conference programme](#)). Conference Reports will also be made available and will be posted on the [event webpage](#).

An **interactive debate with major stakeholders** will take place from 11:00 to 13:00 on 31 July 2025.

In order to register for the General Debate and panels, please complete the [speakers registration form](#) and return to Documents Control (documents@ipu.org) by 15 July 2025.

A limited number of rooms at the *Palais des Nations* will be available for **bilateral meetings**, with bookings made through the IPU Secretariat.

Size and composition of delegations

The size of the delegation of each parliament shall, in principle, not exceed four persons (six persons in the case of bicameral parliaments), including the Speaker(s). Associate Members may register a maximum of three delegates. Invited Observer delegations shall, in principle, be composed of no more than two persons.

Languages

The plenary meeting of the Conference will have interpretation into all six official languages of the United Nations (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish). Speakers addressing the Conference in any other language will need to have their individual statements translated into one of the six official languages.

Interpretation in the panel discussions will be in Arabic, English, French and Spanish.

We are currently exploring options for other language channels with the UN technical team and will provide more information on this in the coming weeks.

Registration

As the 6WSCP will take place at the United Nations Office at Geneva (UNOG), we will be using the UN online registration system called Indico. All invited participants should register on Indico and will be issued a digital badge required for entry to UNOG and the meeting rooms. The registration system will be operational from **2 May 2025** and can be accessed via the [event webpage](#). In addition to online registration, please send a formal communication by email to postbox@ipu.org with the composition of the official delegation.

The deadline for registrations is 30 June 2025.

Should delegations encounter any difficulties, they are requested to contact the registration service at conf.services@ipu.org. Permanent Missions will be authorized to activate the digital badges on behalf of their respective delegations. More information on this process will be provided shortly.

A provisional list of participants will be compiled based on registrations received. Delegates will have an opportunity to check the accuracy of this list before the end of the Conference.

The IPU will be able to assist in obtaining UN passes for the Presidents of interested parliamentary assemblies and other special guests.

Media

The United Nations Information Service will issue the necessary passes to allow media (journalists and photographers) access to the United Nations Office at Geneva.

Journalists holding annual badges to enter the *Palais des Nations* are not required to register for this event.

Security

Due to ongoing renovation work at the *Palais des Nations*, duly registered participants with digital badges will enter through the Pregny Gate (entrance opposite the International Red Cross and Red Crescent Museum). Please follow the instructions of the security agents at the Pregny Gate to reduce waiting times. Please arrive early to allow sufficient time for screening and access to the UN. Participants holding a valid UNOG identification badge may use the entrances at the Pregny Gate and the Peace Gate (entrance on Place des Nations opposite the Broken Chair).

Exit from the *Palais des Nations* can be through the Pregny or Peace Gates.

Parking inside the *Palais des Nations* is allowed only for registered vehicles. Specific stickers will be produced and distributed by the UN security service.

Any special arrangements for Speakers who travel with a close security detail should be organized bilaterally between the country's Permanent Mission to the United Nations in Geneva and the UN Safety and Security Service. Any related costs will be borne by the country making the request.

- National Security Officers accompanying Speakers who require further information or have any questions regarding security, should contact officeofthechief.security-unog@un.org
- Weapons are not permitted on UN territory or at the sites of social events.
- Specific briefings to advance teams should be organized one week before the event – in order to book a timeslot please contact officeofthechief.security-unog@un.org.

Security at the *Palais des Nations* and during the social events will be subject to strict criteria and regulations.

Accommodation

The IPU has made provisional block bookings at hotels in Geneva (see the [event webpage](#) for more information).

July is a particularly busy month for hotels in Geneva. Delegates are therefore advised to make their hotel reservations as soon as possible. Delegations from countries with an embassy or permanent mission in Geneva are invited to contact them, as they are accustomed to receiving delegations to UN meetings and handling hotel reservations. In keeping with the practice of hotels in Geneva, only reservations made with a credit card guarantee will be confirmed.

Visas

Switzerland is a member of the Schengen Area.

Should you require an entry visa for Switzerland:

- It is highly recommended that appointments are made, and Schengen visa applications lodged well in advance with the Swiss Embassy/Consulate responsible for the delegate's legal residence. For details, please refer to www.swiss-visa.ch/ivis2/#/i210-select-country.
- Visa applicants must consult the website of the responsible Swiss Embassy/Consulate to check the current appointment and visa application procedure.
- It is high season for some Embassies/Consulates, meaning appointments must be made well in advance.
- Depending on where delegates have their legal residence, some may have to travel to a different country to lodge their visa application and register their biometric data.
- Some nationalities are subject to a Schengen consultation, which lasts 8-10 days.
- Under exceptional and urgent circumstances, Swiss Embassies or Consulates may issue visas with limited territorial validity (LTV) in accordance with Schengen regulations. This only applies to individual cases that are duly justified. A holder of an LTV visa, which is only valid for Switzerland, cannot visit nor transit through another Schengen State (they must enter and exit the Schengen area via Switzerland only).

If the IPU is required to provide a nominative invitation for a participant's visa application, please ensure that a copy of the delegate's passport is sent to IPU Headquarters (ts@ipu.org).

Transportation

As for previous IPU Speakers' Conferences, transport and escort arrangements are the responsibility of the respective delegations. Please coordinate with your embassy or permanent mission.

Projet de Déclaration de haut niveau de la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement¹ (Genève, 29-31 juillet 2025)

Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous

1. Nous, présidents de parlement du monde entier, sommes réunis afin de faire le point sur les nombreuses crises qui submergent le monde d'aujourd'hui et de réaffirmer les principes fondamentaux qui doivent guider notre action parlementaire future.
2. Forts de notre rôle de présidents de parlement, nous pouvons contribuer à stimuler le débat public, à défendre les pratiques démocratiques au sein de nos parlements et à ~~orienter les résultats de nos travaux législatifs, et~~ exercer une diplomatie parlementaire afin de faire progresser la paix et la compréhension entre les peuples. Par-dessus tout, nous pouvons exercer un leadership moral et servir de modèle à nos collègues parlementaires et aux citoyens en général.

Le monde dans la tourmente

3. Nous constatons avec inquiétude que la situation dans le monde n'est pas sensiblement meilleure aujourd'hui que lors de notre dernière réunion en 2021, durant la pandémie de COVID-19. À l'heure actuelle, presque partout dans le monde, nous observons un sentiment généralisé de malaise et d'anxiété. Ce sentiment reflète, selon nous, un manque de paix, entendue non seulement comme l'absence de conflit, mais aussi comme la satisfaction des besoins humains fondamentaux tant au niveau individuel qu'au niveau sociétal.
4. ~~L'il est particulièrement inquiétant de constater l'érosion rapide du multilatéralisme se généralise, cédant la place à des récits guidés par une vision à court terme qui imposent des et la progression de perspectives unilatérales tout en négligeant les réalités égoïstes et à somme nulle qui ne tiennent pas compte des défis complexes du terrain.~~ Les progrès vers un monde pacifique et la vision transformatrice du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable (ODD), qui ont inspiré nos déclarations passées, sont pratiquement au point mort. En particulier :
 - a. nous assistons à une tendance croissante au mépris de l'état de droit **et des menaces accrues qui pèsent sur la démocratie**, tant au niveau national qu'international ;
 - b. le nombre et l'ampleur des conflits à l'intérieur des pays et entre les pays, ainsi que les victimes civiles qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les enfants, ont augmenté ~~en nombre et en étendue ; il est à craindre que l'escalade de faute d'être maîtrisés, ces conflits pourrait conduire à des activités contraires au~~ **ont favorisé un contexte dans lequel les violations du droit international humanitaire et aux droits des droits de l'homme, et que la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent n'ait pas donné les résultats escomptés sont de plus en plus fréquentes ; le terrorisme et l'extrémisme violent restent des phénomènes très répandus à l'échelle mondiale ;**
 - b bis. **la montée du nationalisme et la mise en œuvre de politiques protectionnistes sapent l'esprit de collaboration et de coopération entre les nations ; cette tendance menace les liens à l'échelle mondiale et remet en question les principes de coopération et de solidarité qui sous-tendent le multilatéralisme ;**

¹ L'expression "présidents de parlement" désigne tous les présidents des parlements nationaux monocaméraux ou de l'une ou l'autre chambre des parlements nationaux bicaméraux, quel que soit leur titre officiel.

- b ter. **la désinformation croissante et l'utilisation abusive des plateformes de communication mondiales ont conduit à une distorsion de la perception du public et des processus décisionnels ; ce phénomène est susceptible d'influencer les élections, les décisions politiques et les relations internationales ;**
- b quater. **les progrès en matière de promotion de l'inclusion, de l'accessibilité et du soutien aux personnes handicapées dans les fonctions politiques ont été lents, ce qui a entraîné une sous-représentation ; cette absence de représentation peut perpétuer des politiques qui ne répondent pas de manière adéquate aux besoins et aux droits des personnes handicapées ;**
- c. le nombre de personnes déplacées de force n'a jamais été aussi élevé ;
- d. la reprise alarmante de la course à l'armement nucléaire, s'accompagnant de menaces croissantes d'utilisation d'armes et de l'érosion des normes de désarmement, constitue un risque existentiel pour la survie de l'humanité ;
- e. l'environnement politique est de plus en plus fracturé, les partis d'opposition étant trop souvent dépeints comme des ennemis et le terrain d'entente entre les factions politiques étant trop difficile à trouver ; le rôle des processus décisionnels fondés sur des données probantes et des vérités scientifiques fondamentales est remis en question ;
- f. Les capacités maximales de la planète, qui déterminent les limites de la durabilité, sont soumises à des pressions continues, sans que l'on puisse en voir la fin ; ~~le système climatique est au bord de l'effondrement~~ **le monde est confronté à une urgence climatique** et les pays en développement et les ~~populations les plus vulnérables de la planète~~ **personnes en situation de vulnérabilité** supportent la majeure partie du fardeau ;
- g. la pauvreté augmente à nouveau et les inégalités se creusent ;
- h. le pouvoir économique et financier se concentre de plus en plus entre les mains d'un petit nombre de personnes, ~~sapant~~ **mettant en péril** les principes ~~fondamentaux~~ d'équité, d'égalité et de participation inclusive ; ~~le rééquilibrage~~ **l'examen approfondi des structures de financement doit encore être réalisé de manière à** **pourrait améliorer les perspectives pour** combler les écarts existants, à réduire les inégalités et à ~~renforcer~~ **encourager davantage** la participation coopérative entre les nations ;
- i. les avancées en matière d'égalité des sexes et de réalisation des droits des femmes sont beaucoup trop lentes et se heurtent à des résistances et à des régressions dans un certain nombre de pays ;
- j. l'intolérance à l'égard des migrants et des réfugiés, des communautés religieuses, ~~des minorités~~ **des peuples autochtones** et des ~~groupes~~ autres **personnes en situation de vulnérabilité**, y compris des apatrides ~~et des minorités ethniques~~, resurgit ;
- k. l'intelligence artificielle et d'autres technologies **de l'information et de la communication** émergentes pénètrent tous les aspects de l'existence humaine et la ~~réglementation~~ **les outils** visant à protéger les personnes et les institutions ~~est~~ **sont** très limités ;
- l. les jeunes restent ~~largement~~ **fortement** sous-représentés dans les processus décisionnels politiques, alors que ce sont eux et les générations futures, qui seront les plus touchés par le manque d'efforts visant à relever tous les défis susmentionnés.
- I bis. **l'architecture politique et économique internationale actuelle n'est pas en mesure de répondre à tous ces défis et crises contemporains.**

5. Pour sortir du contexte des progrès lents, des revers et des menaces émergentes, nous ne devons pas nous contenter de nous attaquer à leurs causes ~~immédiates~~ **principales**. Nous devons avant tout faire appel à un sentiment fondamental d'humanité partagée ~~et à un désir commun~~ **afin de travailler ensemble en vue** d'un monde plus pacifique, plus juste et plus prospère, qui est solidement fondé sur la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Tant qu'il n'y aura pas de justice et que l'impunité prévaudra pour les auteurs de ces actes, il n'y aura pas de paix véritable pour les personnes qui vivent des situations d'exclusion, d'exploitation, de violence, de discrimination, ~~d'occupation, de sous-rémunération, de privation de~~

~~droits ou de handicap, et celles laissées de côté au sein de leurs communautés et dans le monde~~
et de déni des droits et libertés fondamentaux.

Transitions clés vers la paix, la justice et la prospérité

7. Inspirés par les valeurs et les principes de l'UIP, ainsi que par les résultats des principaux processus des Nations Unies au cours de ces dernières années, nous sommes parvenus à la conclusion que la construction d'un monde plus pacifique, plus juste et plus prospère nécessite les grandes transitions politiques ci-après :

- a. Assurer le strict respect ~~des normes et principes~~ **total et constant** du droit international et **des principes** de la Charte des Nations Unies, ~~en particulier y compris~~ la souveraineté, l'intégrité territoriale ~~et~~, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ~~sans aucune sélectivité et la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de manière cohérente et non sélective.~~
- a bis. **Mettre en place des institutions solides, transparentes et redevables pour maintenir la paix et la justice. Cela implique notamment de réformer les systèmes judiciaires, de renforcer l'application de la loi et de veiller à ce que les structures de gouvernance soient inclusives et équitables.**
- b. Donner la priorité à la prévention des conflits et investir dans ce domaine, tout en redéfinissant la "sécurité" de manière plus large, en associant le concept traditionnel fondé sur la puissance militaire aux approches de la sécurité humaine et de la sécurité commune² afin de réaliser une sécurité globale et durable.
- b bis. **Promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) à des fins pacifiques et unir les efforts pour lutter contre la criminalité liée aux TIC, tout en maintenant le rôle central des Nations Unies et de ses organismes spécialisés dans ces domaines.**
- c. Intégrer plus efficacement les ODD dans les politiques, stratégies et budgets nationaux afin de fournir une approche intégrée de l'éradication de la pauvreté, de la lutte contre les changements climatiques, de la réduction des inégalités et de la promotion de la paix, de la justice et de la prospérité.
- d. Faire évoluer le paradigme économique actuel vers un modèle davantage axé sur les personnes et fondé sur la coopération, la solidarité, l'inclusion et la durabilité. Des modèles économiques tels que l'économie des soins rémunérés, l'économie verte et l'économie circulaire, entre autres, doivent être intégrés. La transition visant à s'éloigner de l'économie basée sur les combustibles fossiles doit s'accélérer si nous voulons jouir d'un avenir durable sur cette planète. Parallèlement, ce changement doit être soigneusement planifié, en tenant compte des différentes circonstances et priorités nationales. La coopération doit être la force motrice de l'innovation scientifique et technologique afin que l'humanité devienne meilleure.
- e. Investir davantage dans la santé, l'éducation, la préservation de l'environnement et d'autres biens publics qui bénéficient directement ~~à la population~~ **aux personnes. Les êtres humains sont notre ressource la plus importante, dont tout le reste dépend.** Les dépenses pour les programmes sociaux et les infrastructures publiques doivent être considérées comme des *investissements* pour l'avenir et non comme des coûts actuels. Les mesures d'austérité dictées par les déficits budgétaires et d'autres impératifs financiers doivent être calibrées de manière à protéger d'abord les ~~plus vulnérables~~ **personnes en situation de vulnérabilité.**
- f. Promouvoir l'égalité des sexes, en droit et en pratique, dans tous les domaines et à tous les niveaux, en particulier dans les parlements, mais également dans les institutions internationales, la société civile et le secteur des entreprises, en tant que condition nécessaire à la paix, au développement et à la justice. Le monde ne peut se permettre de gaspiller 50 % de ses talents. La parité hommes-femmes dans les parlements est une étape essentielle de la transition significative vers la réalisation de l'égalité des sexes et du respect des droits des femmes partout dans le monde. Les lois, les politiques et les budgets doivent être analysés et contrôlés au prisme de l'égalité entre les hommes et les femmes afin de

² La *sécurité humaine* met l'accent sur la protection des individus contre les menaces que sont la peur, le manque et l'indignité en s'attaquant aux causes profondes de l'insécurité et de la souffrance humaine. La *sécurité commune* incarne l'idée qu'aucune nation ne peut atteindre la sécurité seule, aux dépens d'une autre, et que la meilleure façon pour les pays de construire la sécurité est la coopération, la réciprocité et le multilatéralisme.

- s'assurer d'obtenir des résultats équitables et de soutenir une culture de tolérance zéro à l'égard de la discrimination et de la violence ~~fondées sur le sexe~~ **à l'égard des femmes**.
- g. Donner aux jeunes les moyens d'agir, mettre à profit leurs points de vue et leur potentiel, renforcer leur confiance en matière d'élaboration des politiques et tirer parti de leur esprit d'innovation afin qu'ils puissent mieux contribuer à la résolution des problèmes mondiaux. Il s'agit notamment de renforcer la participation politique et le leadership des jeunes hommes et des jeunes femmes et de mettre en place des politiques publiques adaptées aux besoins des jeunes dans tous les domaines.
 - h. Valoriser la diversité dans nos sociétés comme un atout à cultiver et à protéger et non comme une menace à craindre, notamment en veillant à ce que les droits de tous les individus, tels qu'ils sont reconnus dans le cadre du droit international des droits de l'homme, soient respectés et protégés. Une meilleure prise en compte de la diversité des expériences et de l'enrichissement mutuel des idées et des cultures, ce qui accroît les connaissances, conduit à l'innovation et facilite les efforts de tous les acteurs pour faire face aux complexités de ce siècle. Une connaissance accrue de notre diversité peut également contribuer à la tolérance, à l'acceptation et à la compréhension mutuelle entre les personnes, les communautés et les groupes, créant ainsi les conditions d'une paix durable. Les migrations contribuent depuis longtemps à la diversité et au développement et peuvent être gérées de manière appropriée afin d'en maximiser les avantages pour les pays d'accueil et les pays d'origine.
 - i. Admettre l'idée que les problèmes mondiaux exigent une action collective fondée sur la prise de conscience qu'aucun État ou groupe d'acteurs ne peut relever seul ces défis mondiaux. L'engagement multilatéral est le moyen le plus efficace pour les pays de trouver des solutions aux questions brûlantes de notre époque, du désarmement et de la non-prolifération nucléaires aux changements climatiques, en passant par la stabilité financière mondiale, **la santé mondiale**, le commerce international, l'intelligence artificielle et les migrations. Les mécanismes multilatéraux de coopération tels que **le G7**, le G20, les BRICS, **l'OCDE** et d'autres doivent travailler en étroite collaboration **et coordination** avec le système multilatéral dirigé par l'ONU.
 - j. Renforcer la pratique de la démocratie dans nos pays et dans les relations internationales, **en mettant fortement l'accent sur la collaboration multilatérale**, et défendre les valeurs démocratiques de transparence, de dialogue inclusif et ~~de respect~~ **de promotion et de protection** des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la vie politique et la société. Les parlements, en tant que principale institution représentative de la nation, ont la responsabilité particulière d'incarner les pratiques et les valeurs démocratiques, **et d'assurer la redevabilité**.

Notre engagement pour l'avenir

8. Nous saluons le Pacte pour l'avenir adopté par les Nations Unies en septembre 2024, ainsi que le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures qui l'accompagnent. Il s'agit du dernier effort en date de la communauté mondiale pour reconstituer l'ordre multilatéral sur des bases plus solides, donner un coup d'accélérateur aux ODD et trouver un terrain d'entente sur les questions clés de notre époque.

9. Nous soulignons le rôle crucial des organisations parlementaires et de la coopération interparlementaire dans la gouvernance mondiale, en particulier pour soutenir le respect des normes et des principes du droit international, la consolidation et le maintien de la paix, les droits de l'homme et le développement durable.

10. Nous prenons tout particulièrement note de la Mesure 55 du Pacte pour l'avenir qui appelle à accroître la participation des parlements aux travaux de l'ONU, y compris à ses processus intergouvernementaux, qui s'appuie sur 25 ans d'interaction croissante entre l'ONU, les parlements nationaux et l'UIP. Nous notons avec satisfaction l'action de l'UIP visant à démocratiser la gouvernance mondiale en ouvrant le système multilatéral dirigé par l'ONU à la contribution des parlements et des parlementaires.

11. Compte tenu de ce contexte, nous nous efforcerons de prendre les mesures suivantes :

- a. intensifier les efforts pour mettre en place un multilatéralisme plus fort et plus efficace, avec les Nations Unies en son centre, qui soit au service des peuples et de la planète ;

- b. ~~contribuer à une réforme efficace des Nations Unies et de l'architecture financière mondiale en vue de combler le déficit démocratique dans les relations internationales, notamment en remédiant aux principaux défauts du Conseil de sécurité de l'ONU et en s'attaquant aux pratiques déloyales en matière d'allègement de la dette et de réformes structurelles dans les pays du Sud, y compris du Conseil de sécurité, et de l'architecture financière mondiale, en faveur de sociétés pacifiques, justes et inclusives, afin d'atteindre les ODD et de combler le déficit de financement des pays en développement ;~~
- b bis. appuyer un système commercial multilatéral équitable, ouvert et non discriminatoire, avec l'Organisation mondiale du commerce en son centre, et favoriser un environnement propice au commerce et à l'investissement pour tous ;**
- c. accroître la connaissance au sein des parlements des principaux accords des Nations Unies, tels que le Pacte pour l'avenir, le Programme de développement durable à l'horizon 2030, l'Accord de Paris sur la lutte contre les changements climatiques, le Pacte mondial ~~sur~~ **pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, et le Pacte mondial sur les réfugiés et la Déclaration et le Programme d'action de Beijing** afin que, dans chaque contexte national, les engagements soient mis en œuvre au moyen de lois, **de réglementations, de politiques** et de budgets ;
- d. ~~renforcer~~ **encourager** le contrôle parlementaire sur les positions prises, **y compris les accords convenus**, par les gouvernements à l'ONU et dans d'autres forums internationaux ;
- e. partager les connaissances avec les citoyens et le grand public en général des principaux accords des Nations Unies afin de favoriser une meilleure appropriation et compréhension de leurs objectifs par les pays ;
- f. favoriser une participation plus active de nos parlements aux principaux processus des Nations Unies et autres processus mondiaux afin d'apporter une contribution et de renforcer l'appropriation parlementaire des résultats pertinents, en accordant une attention particulière à l'inclusion de toutes les principales forces politiques, ainsi qu'à la participation des femmes et des jeunes ;
- g. ~~faciliter la parité~~ **l'égalité** hommes-femmes et une plus grande représentation des jeunes ainsi que des ~~groupes minoritaires~~ **personnes en situation de vulnérabilité** et d'autres groupes sous-représentés dans nos parlements afin de mieux refléter leur part de la population générale et d'assurer leur participation et leur influence ; il s'agit notamment de faire en sorte que les parlements soient des environnements sûrs, exempts de discrimination et de violence ;
- h. ouvrir nos parlements à une plus large participation au processus législatif de la société civile, du monde des affaires, de la communauté scientifique, des syndicats, des communautés religieuses, des groupes minoritaires ainsi que des citoyens dans toute leur diversité ;
- i. mettre en œuvre la diplomatie parlementaire en complément des efforts gouvernementaux, afin de prévenir **et résoudre** les conflits ~~et de contribuer à leur résolution~~ en s'attaquant à leurs causes profondes, en engageant un dialogue direct avec tous les acteurs concernés et en accordant la priorité à la sécurité des civils et au respect du droit international humanitaire ;
- j. reconnaître et promouvoir la diplomatie scientifique **en tant qu'outil essentiel** pour résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté, éclairer ~~la~~ **les processus de** prise de décision et faire progresser les objectifs diplomatiques de manière plus générale ; **les parlements doivent soutenir activement l'intégration de l'expertise scientifique dans les efforts diplomatiques et avoir recours à des approches fondées sur des données probantes afin d'élaborer des politiques mieux informées ;**
- k. soutenir la prévention des souffrances humaines causées par les armes et garantir la surveillance parlementaire des engagements pris en matière de désarmement, de contrôle des armes et de non-prolifération des armes de destruction massive ;
- l. encourager les auditions parlementaires qui examinent, entre autres, les causes profondes des conflits et de l'insécurité, telles que les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, la sécurité alimentaire, les maladies, la pauvreté, l'exclusion sociale et la discrimination, ~~qui dépassent les définitions classiques dans ce domaine ;~~
- m. participer activement aux efforts au niveau mondial pour réglementer et exploiter le potentiel des technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle, afin d'en maximiser les avantages et d'en minimiser les risques ;

- n. soutenir un plan d'action pour renforcer les compétences numériques des parlementaires et de l'administration parlementaire, afin que le parlement soit une institution moderne, équipée pour façonner notre avenir numérique, notamment en ce qui concerne la réglementation éthique de l'intelligence artificielle ;
- o. promouvoir des processus législatifs inclusifs et efficaces, afin de soutenir une culture de respect mutuel, de dialogue et de compréhension dans le cadre des délibérations parlementaires, en veillant à ce que toutes les voix, tous les points de vue et tous les groupes d'intérêt soient entendus et appréciés à leur juste valeur ;
- p. envisager la création d'une commission parlementaire du futur pour traiter les questions transversales émergentes dans les parlements où une telle commission n'est pas encore en place.

12. Nous remercions nos hôtes, la Confédération helvétique, l'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que le Secrétaire général de l'ONU et le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le soutien qu'ils ont apporté à notre Conférence, ce qui est une nouvelle illustration du partenariat étroit entre l'UIP et l'ONU, soit l'une des clés pour faire de ce monde un endroit meilleur où ~~règnent~~ **existent des voies vers** la paix et la justice pour tous.

N.B. Nous reconnaissons qu'en raison de leur position constitutionnelle ou d'autres facteurs, certains présidents de parlement ne peuvent pas s'associer directement à des déclarations politiques de fond et ne doivent donc pas être considérés comme apportant un soutien spécifique à toutes les sections. Néanmoins, au nom de leurs chambres, ils reconnaissent l'importance des questions soulevées et les intentions de leurs collègues de proposer des solutions spécifiques.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



**United
Nations**

#6WCSP

Programme of the Sixth World Conference of Speakers of Parliament (Geneva, 29-31 July 2025)

Palais des Nations, United Nations Office at Geneva

Tuesday, 29 July 2025

- | | |
|---------------|--|
| 10:00 – 12:00 | Final meeting of the Preparatory Committee¹ |
| 14:00 – 14:50 | Arrival of Speakers / Welcome by the IPU and United Nations |
| 15:00 – 16:00 | Inaugural session of the Sixth World Conference of Speakers of Parliament |
| 16:00 – 18:00 | Start of the General Debate on <i>A world in turmoil: Parliamentary cooperation and multilateralism for peace, justice and prosperity for all</i> |
| | Panel discussion
<u>Panel 1:</u> <i>Women's and youth participation in parliament in a time of polarization and adversity</i> |
| 19:00 | Official reception offered by the Parliament of Switzerland |

¹ Closed meeting

Wednesday, 30 July 2025

09:30 – 13:00	Continuation of the General Debate
09:30 – 11:00	Panel discussion <i>Panel 2: Innovating for a peaceful future, crafting new solutions for a turbulent world</i>
11:30 – 13:00	Panel discussion <i>Panel 3: Achieving the SDGs by 2030: What new opportunities for international cooperation?</i>
13:00 – 14:30	Lunch offered by the IPU President and Secretary General in honour of all Speakers (by invitation)
14:30 – 15:00	Group photo (Speakers only)
15:00 – 18:30	Continuation of the General Debate
15:00 – 16:30	Panel discussion <i>Panel 4: What role for parliaments in shaping our digital future?</i>
17:00 – 18:30	Panel discussion <i>Panel 5: Protecting and promoting the rights of persons in vulnerable situations: Towards comprehensive anti-discrimination action</i>

Thursday, 31 July 2025

09:30 – 11:00	Continuation and conclusion of the General Debate
11:00 – 13:00	Interactive Debate with major stakeholders
14:30 – 17:00	Closing session Reports from the panel discussions Adoption of the High-level Declaration

Description of panel discussions

Panel 1: Women's and youth participation in parliament in a time of polarization and adversity

In recent years, political polarization has increased both within countries as well as between them, further challenging the perceived legitimacy and effectiveness of national and global governance bodies. As institutions designed to represent the diversity of populations, parliaments face the challenge of fostering inclusion of all groups, including women and youth in all their diversity. An inclusive parliament is understood as one that not only actively opens doors for all to be represented in parliament, but also for those representatives to be influential and to lead.

Polarization, coupled with politics increasingly taking place in the digital sphere, has resulted in representatives and aspirants, especially from under-represented groups, facing increased hostility and violence, both online and offline. This panel will identify the barriers, including violence (both online and offline), that need to be overcome for more inclusive parliaments. It will also address the structural changes needed within parliaments to foster a more gender-sensitive and inclusive environment that supports gender parity and diversity in parliamentary representation, with a focus on young women's participation.

Panel 2: Innovating for a peaceful future, crafting new solutions for a turbulent world

The world today faces numerous challenges that threaten peace and stability, including armed conflict, terrorism and organized crime, in addition to the challenge of the climate crisis. These issues endanger the lives and well-being of up to 2 billion people² and exacerbate poverty and inequality, especially for marginalized groups. The United Nations Secretary-General's 2023 *A New Agenda for Peace* calls on States to transcend competitive dynamics, adapt to today's technological and geopolitical realities, and embrace cooperation and collective action to address interconnected global challenges and achieve recognized common goals. As representatives of the people, responsible for ensuring the security and peaceful lives of their citizens, parliamentarians are well placed to follow these guidelines to address the root causes of conflict and enhance global stability.

In line with the notions of human security and common security, parliamentarians are called upon to implement a multifaceted and accountable approach that prioritizes trust-building, dialogue to defuse tensions, and inclusivity to ensure long-term security and stability. To that end, they will need to integrate climate considerations and propose peace education programmes that include mutual learning between civilizations and intercultural dialogue to eliminate barriers. They will also need to harness technology, while managing some of the risks emerging technologies may pose, and promote new forms of international cooperation. The panel discussion will aim to identify and share practical and innovative solutions in conflict prevention and peacebuilding, and to promote interdisciplinary and cross-border cooperation for a more peaceful world.

Panel 3: Achieving the SDGs by 2030: What new opportunities for international cooperation?

Since the adoption of the Sustainable Development Goals (SDGs), the global landscape has undergone significant changes, shaped by the COVID-19 pandemic, the climate emergency and a growing number of conflicts. Ongoing and emerging risks, particularly climate change and the potential for new pandemics, are expected to hinder progress toward achieving the Goals. While overall progress on the SDGs has been insufficient, the accelerated action needed over the next five years could however create new opportunities for international cooperation and dialogue.

² [UN Press Release, 26 January 2023](#)

Parliaments have a vital role to play through legislation – such as adopting measures to eradicate poverty and enhance food security, repealing discriminatory laws, engaging with affected individuals and communities, and investing in health, green energy and other public goods. The panel will draw on examples of successful parliamentary action to discuss how to promote cooperation, mutual learning, and equitable and inclusive sustainable development for current and future generations.

Panel 4: What role for parliaments in shaping our digital future?

Digitalization is firmly embedded in all societies around the world, even as digital divides persist both between and within countries. Young people everywhere live in a world that seamlessly combines online and offline spaces. The world's biggest companies come from the technology sector, and they have a disproportionate influence over society, the economy and the future of the planet. In this fast-moving environment, what is the role of parliaments in shaping our digital future? As artificial intelligence (AI) emerges, with the attendant opportunities and risks, what lessons can be learned from the governance of technology, including the internet and social media, over recent decades?

The panel discussion will provide a space for sharing perspectives on the digital future that we want, and how to achieve it. Leading representatives from the United Nations system and civil society will reflect on progress and challenges in the 20 years since the World Summit on the Information Society, including recent initiatives surrounding the Global Digital Compact, the Internet Governance Forum and international governance of AI. Speakers of Parliament will offer insights into how their countries are taking action to promote innovation and protect citizens' rights in the fast-moving digital environment.

Panel 5: Protecting and promoting the rights of persons in vulnerable situations: Towards comprehensive anti-discrimination action

Anti-discrimination is a fundamental principle in international law and is enshrined in various global treaties and agreements. It is meant to protect persons in a wide range of vulnerable situations and help to avoid discrimination on grounds such as race, religious belief, age, national origin or disability, to name just a few. These vulnerabilities are also particularly prominent in situations of enforced internal displacement and migration. Yet still today, it is estimated that more than half of the world's countries do not have laws that provide effective and comprehensive protection against all forms of discrimination. Comprehensive and effective anti-discrimination laws are a crucial condition for equal participation in public life and the full enjoyment of human rights. The adoption of such laws should be part of a multi-faceted approach involving policy, education, advocacy and cultural shifts, to bring about real change to tackle discrimination.

The panel discussion will allow an exchange of good practices on the role of parliaments and parliamentarians in developing, enacting and implementing context-specific comprehensive equality laws as well as taking other steps to promote equality in practice and addressing the root causes of violence, deprivation, inequality, internal strife and conflict.

Interactive debate with major stakeholders

“Networked” global governance for more effective multilateralism: Does it work?

Concept note

For many years, the United Nations-led multilateral system has been deploying considerable efforts to effectively deal with the major global challenges of our time. Nonetheless, rising economic and social inequalities, pandemics, run-away global warming, the rapid advancement of artificial intelligence, and a growing number of conflicts with global repercussions are testing the limits of global governance. As a result, people and communities around the world are calling into question the very idea of multilateralism as an expression of democracy. There is a growing recognition that no single institution or group of actors can tackle these global problems alone, resulting in calls for a more inclusive multilateralism that involves a diverse array of stakeholders across all levels of society.

In recent years, and most notably in the [Our Common Agenda](#) report of the UN Secretary-General, a vision of a more “networked” international cooperation landscape has emerged, with a view to enabling key stakeholders to better contribute to decision-making outcomes and their implementation. In September 2024, endorsing this vision, governments worldwide adopted the [Pact for the Future](#). The document includes a strong commitment under Action 55 to “*strengthen partnerships to deliver on existing commitments and address new and emerging challenges*”. More specifically, governments have declared:

“We recognize the importance of the United Nations engagement with national parliaments and relevant stakeholders, while preserving the intergovernmental character of the Organization. The challenges we face require cooperation not only across borders but also across the whole of society. Our efforts must involve Governments as well as parliaments, the United Nations system and other international institutions, local authorities, Indigenous Peoples, civil society, business and the private sector, faith-based organizations, the scientific and academic communities, and all people to ensure an effective response to our common challenges.”

While the UN remains a cornerstone of international cooperation and multilateralism, contemporary global governance has also expanded beyond the formal structures of treaty-based intergovernmental organizations. It now includes parallel multi-stakeholder processes, such as international public-private partnerships, “informal” governance forums, global civil society coalitions and transnational private sector initiatives. These developments raise questions about the potential benefits and challenges of a more “networked” approach to global governance.

Parliaments also have a unique role in this landscape. Through its “parliamentary ecosystems” approach, the IPU has incorporated a broader perspective that looks at the actors, interactions and dynamics that both influence and are influenced by parliaments. Parliaments can play an important role in a “networked” approach to global governance by promoting accountability and democracy at the international level, carrying out parliamentary diplomacy in the service of peace, bringing the people’s voice to the multilateral landscape, and helping oversee the translation and implementation of international commitments into domestic policies.

This special interactive debate of the Speakers’ Conference will bring together Speakers of Parliament, civil society representatives, entrepreneurs and academics, as well as representatives of women’s, youth and other key stakeholder organizations. The purpose is to explore how a more inclusive and “networked” form of global governance can make multilateralism more effective, and to examine the implications and challenges of such an approach.

The following questions will drive the discussion:

- How can non-State partners go beyond merely providing input to global governance processes, to actually influencing outcomes?
- How can the United Nations and other intergovernmental organizations best distil common perspectives from non-State partners contributing divergent views?
- Does the outsize influence of certain organized groups interfere with democratic decision-making?
- How can constituency groups be better included in parliamentary oversight of government interventions at the United Nations and other intergovernmental organizations?
- How might the inclusion of multiple actors affect decision-making processes in terms of efficiency, coherence and accountability?
- What strategies could be employed to ensure that underrepresented groups such as women, youth and Indigenous Peoples can participate meaningfully in global governance discussions?
- What lessons can be drawn from existing collaborations between different transnational stakeholders, and how might these inform future approaches to multilateralism?